



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75123
Telepon/Fax: (0541) – 742283
website: bappeda.kaltimprov.go.id email: bappeda@kaltimprov.go.id

Samarinda, 10 November 2023

Nomor : 000.7/1711/Bapp-IV
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri UNDANGAN
(Daftar Terlampir)
Di
Tempat

Green Financing merupakan terobosan terbaru bagi industri keuangan untuk mengalirkan dan mengalokasikan aliran dana kepada bisnis yang berorientasi pada keberlangsungan lingkungan. Hal ini juga secara luas dapat merujuk ke investasi keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan inisiatif, produk lingkungan, dan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mendukung upaya transformasi ekonomi dan mulai perlahan menaikkan pertumbuhan ekonomi berbasis pada prinsip ramah lingkungan di Kaltim, maka perlu diadakan diskusi yang melibatkan industri jasa keuangan untuk mengembangkan ekonomi hijau melalui konsep *green financing*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan DDPI Kalimantan Timur bermaksud menyelenggarakan "*Pengembangan Kebijakan Green Financing untuk mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau di Kalimantan Timur*" Yang dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu/ 22 November 2023
Pukul : 08:30 WITA-selesai
Tempat : Ruang Crystal 7, Hotel Mercure Samarinda

Besar harapan kami kepada Bapak/Ibu dari Bank Mandiri untuk menjadi penanggung pada kegiatan ini dalam menyampaikan "*Implementasi Green Financing yang dilakukan oleh Bank Mandiri*". Untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang dan hasil yang diharapkan, disampaikan pada kerangka acuan kerja (KAK) terlampir. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat menghubungi *Sdr. Ficky Yosi Ardiles HP. 081345274977* atau email: sekretariatddpikaltim@gmail.com. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala



YUSLIANDO
NIP. 19671005 199603 1 009

Lampiran I
No. Surat : 000.7/ 1711 /Bapp-IV
Tanggal : 10 November 2023
Perihal : Undangan Peserta

DAFTAR UNDANGAN

Pemerintah Provinsi

1. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Balitbangda Prov. Kalimantan Timur
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
4. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Prov. Kalimantan Timur
6. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Prov. Kalimantan Timur
7. Kepala Dinas ESDM Prov. Kaltim
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim
9. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim
11. Kepala Disperindagkop Provinsi Kalimantan Timur
12. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
13. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
14. Kepala KPHP Delta Mahakam
15. Kepala KPHP Sub Das Belayan
16. Kepala KPHP Santan
17. Kepala KPHP Manoor Bulatn
18. DDPi Kalimantan Timur

Perguruan Tinggi

19. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
20. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSI
21. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik UMKT
22. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda

Jasa Keuangan dan Perbankan

23. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur
24. Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Timur
25. Direktur PT BPD Kaltimara
26. Pimpinan Kantor Cabang PT Bank Negara Indonesia (BNI) Samarinda
27. Kepala Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Samarinda
28. Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Samarinda
29. Pimpinan PT. Bank Central Asia Tbk Samarinda
30. Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda
31. Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Samarinda

Mitra Pembangunan

32. Pokja Perhutanan Sosial Kalimantan Timur
33. GIZ Propeat
34. Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia
35. GIZ JETP

- 36. USAID SEGAR
- 37. Yayasan Konservasi Alam Nusantara
- 38. Yayasan Planet Urgensi Indonesia
- 39. Yayasan BIOMA
- 40. Yayasan BUMI
- 41. Yayasan Mangrove Lestari
- 42. Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) Kaltim

Sektor Swasta

- 43. APhi Kalimantan Timur
- 44. GAPKI Kalimantan Timur
- 45. PT. Gunung Gajah Abadi
- 46. PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim
- 47. PT. Tunas Prima Sejahtera

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Dialog Multipihak: “Pengembangan Kebijakan Green Financing untuk mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau di Kalimantan Timur”

A. Latar Belakang

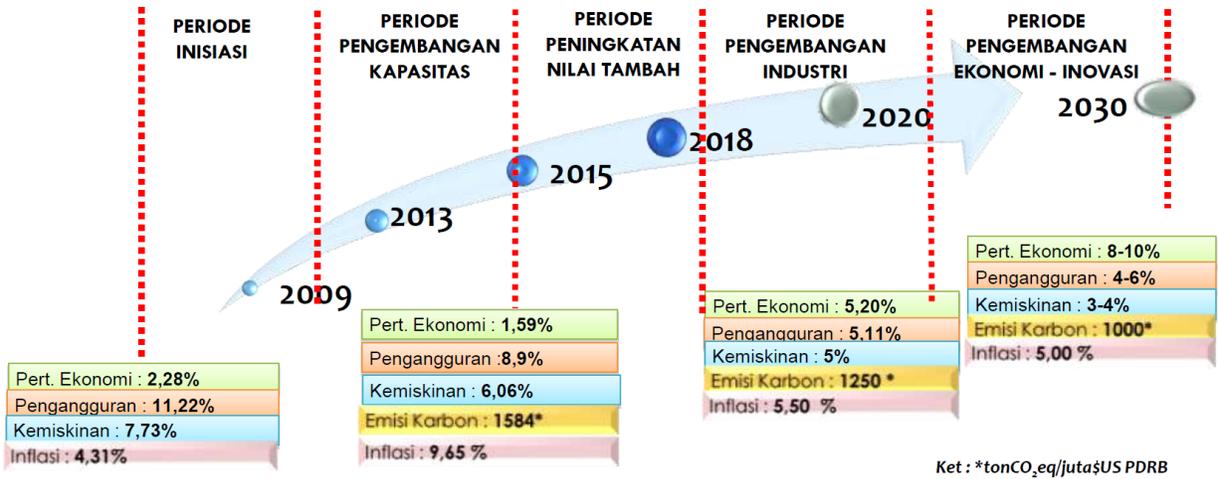
Kemajuan teknologi dan sektor industri merupakan pencapaian terbesar dalam abad-21. Masyarakat global memproduksi dengan skala yang masif sehingga menghasilkan output yang signifikan, terutama di bidang perekonomian. Kegiatan produksi tersebut nyatanya sering kali menghasilkan eksternalitas negatif terhadap alam dan lingkungan. Perekonomian yang bertumbuh serta konservasi alam merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Tantangan dalam mencapai stabilitas kedua hal tersebut adalah perubahan lingkungan, keterbatasan modal, serta sinergitas masyarakat dunia yang belum terbangun.

Green Financing merupakan skema yang tepat dalam menjembatani antara perekonomian dan konservasi alam. *Green Financing* diharapkan dapat berperan sebagai bantuan moneter dunia dalam mengkonstruksi pembangunan hijau yang berkelanjutan, seperti melestarikan lapisan ozon, menjaga ketahanan pangan serta eksplorasi hijau lainnya. *Green Financing* merupakan terobosan terbaru bagi industri keuangan untuk mengalirkan dan mengalokasikan aliran dana kepada bisnis yang berorientasi pada keberlangsungan lingkungan. Hal ini juga secara luas dapat merujuk ke investasi keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan inisiatif, produk lingkungan, dan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan Höhne, et al (2012). Tujuan utama dari konsep *Green Financing* adalah praktik berkelanjutan sebagaimana diartikulasikan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian global. Pelaksanaan SDGs harus melibatkan seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek bisnis di berbagai sektor. Di sektor keuangan, salah satu wujud komitmen keberlanjutan adalah konsep *green financing*.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut mendorong praktik *green financing* melalui kebijakan keuangan berkelanjutan yang tertuang dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap 1 (2015-2019) dan Tahap 2 (2021-2025), Peraturan OJK no. 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, dan Taksonomi Hijau Indonesia (THI). Hal ini sebagai panduan untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia yang berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain. OJK juga membentuk *Task Force* Keuangan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan (SJK) sebagai upaya mewujudkan pengembangan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan.

Sejak Deklarasi Kaltim Green pada tahun 2010, ada keinginan besar Provinsi Kaltim untuk melakukan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun strategi pelaksanaan transformasi melalui skenario pertumbuhan ekonomi hijau. Strategi ini diterjemahkan pada lima tahap atau periode pertumbuhan ekonomi hijau sampai tahun 2050 (**lihat gambar 1**).

“Periode Peletakan Dasar Transformasi Menuju Ekonomi HIJAU Berbasis SDA Yang Terbaharukan”



PENERAPAN KONSEP GREEN EKONOMI DALAM PROSES TRANSFORMASI

Gambar 1. Transformasi menuju ekonomi hijau Kalimantan Timur

Selama ini DDPI Kaltim telah memfasilitasi proses Pembangunan Hijau menuju transformasi ekonomi bersama Organisasi Perangkat Daerah dan mitra strategis yang ada dengan melakukan penguatan baik dari regulasi, kebijakan, peningkatan SDM dan sosialisasi yang lebih luas. Akan tetapi, apa yang telah dilakukan ternyata masih memerlukan dukungan penting yakni investasi atau pendanaan untuk memperkuat Pembangunan Hijau di Kaltim. Indikasi ini terlihat ketika Kaltim melakukan rebug Pembangunan Hijau pada tahun 2022 yang mengarahkan bahwa salah satu pihak strategis perlu dilibatkan yaitu Lembaga perbankan. Salah satu pembahasannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hijau melalui konsep *green financing* yang telah ada. Green Financing merupakan satu konsep dukungan dari jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, untuk mendukung upaya transformasi ekonomi dan mulai perlahan menaikan pertumbuhan ekonomi berbasis pada prinsip ramah lingkungan, maka perlu diadakan diskusi yang melibatkan industri jasa keuangan untuk mengembangkan ekonomi hijau melalui konsep green financing. DDPI Kaltim bekerjasama dengan BAPPEDA Kalimantan Timur dan mitra Pembangunan akan melaksanakan kegiatan dialog multipihak dengan tema **“Pengembangan Kebijakan Green Financing untuk mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau di Kalimantan Timur”**.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari Diskusi ini, secara umum adalah:

1. Menggali dan mendiskusikan tentang ekosistem keuangan yang berkelanjutan.
2. Menggali potensi ekonomi pada kegiatan industri atau usaha kerakyatan yang rendah karbon dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan di Kaltim.
3. Mendiskusikan peluang dan tantangan pengembangan kebijakan *green financing* untuk mendukung kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.

C. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya instrument pengembangan kebijakan atau pengembangan kertas kebijakan green finance dalam mendukung investasi hijau pada kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.

D. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara offline pada:

Hari/tanggal : Rabu/ 22 November 2023

Pukul : 08:30 WITA-selesai

Tempat : Ruang Crystal 7, Hotel Mercure Samarinda

E. Peserta Kegiatan

Pemerintah Provinsi

1. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Balitbangda Prov. Kalimantan Timur
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
4. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
5. Kepala DPTPH Prov. Kaltim
6. Kepala Dinas ESDM Prov. Kaltim
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim
8. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim
10. Kepala Disperindagkop Provinsi Kalimantan Timur
11. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
12. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
13. Kepala KPHP Delta Mahakam
14. Kepala KPHP Sub Das Belayan
15. Kepala KPHP Santan
16. Kepala KPHP Manoor Bulatn
17. DDPI Kalimantan Timur

Perguruan Tinggi

18. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
19. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSI
20. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik UMKT

Jasa Keuangan dan Perbankan

21. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur
22. Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Timur
23. Direktur PT BPD Kaltimtara
24. Pimpinan Kantor Cabang PT Bank Negara Indonesia (BNI) Samarinda
25. Kepala Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Samarinda
26. Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Samarinda
27. Pimpinan PT. Bank Central Asia Tbk Samarinda
28. Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda
29. Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Samarinda

Mitra Pembangunan

30. Pokja Perhutanan Sosial Kalimantan Timur
31. GIZ Propeat
32. Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia
33. GIZ JETP
34. USAID SEGAR
35. Yayasan Konservasi Alam Nusantara
36. Yayasan Planet Urgensi Indonesia
37. Yayasan BIOMA
38. Yayasan BUMI
39. Yayasan Mangrove Lestari
40. Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) Kaltim

Sektor Swasta

41. APHI Kalimantan Timur
42. GAPKI Kalimantan Timur
43. PT. Gunung Gajah Abadi
44. PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim
45. PT. Tunas Prima Sejahtera

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sehingga dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang diharapkan.

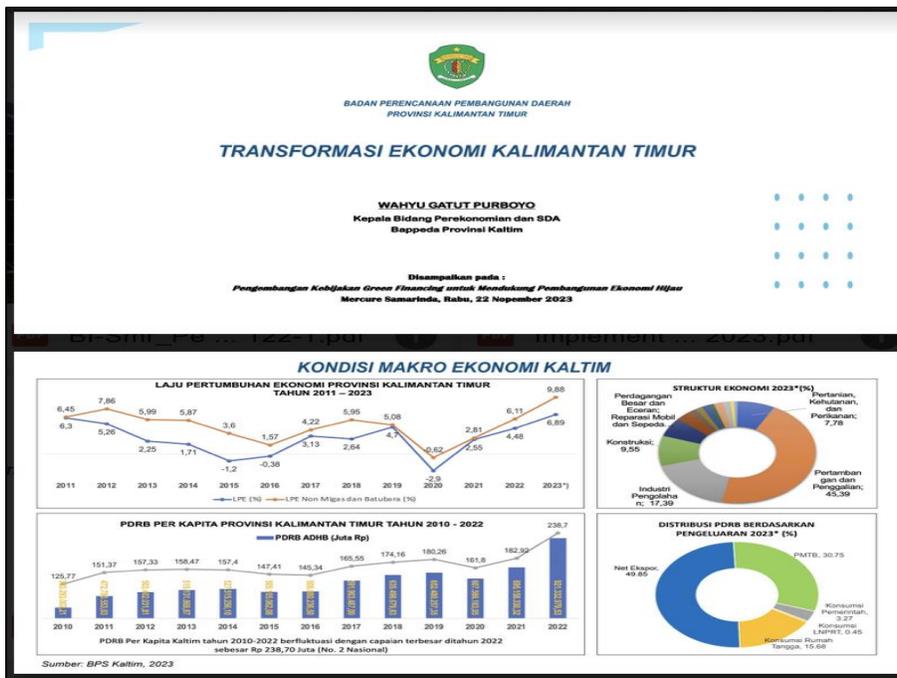
Lampiran Agenda Kegiatan

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.00-08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30-09.15	Pembukaan Acara - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Pembacaan Doa - Sambutan Ketua Harian DDPI - Sambutan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	Panitia Panitia Ketua Harian DDPI Kaltim Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
09.15-09.30	<i>Coffee Break</i>	
09.30-11.00	Sesi Diskusi Tranformasi Ekonomi Provinsi Kalimantan Implementasi Taksonomi Hijau dalam mendukung Keuangan Berkelanjutan Peran perbankan untuk mendukung pembiayaan ekonomi hijau di Kaltim Tanggapan Implementasi Green Financing - Bank Rakyat Indonesia - Bank Negara Indonesia - Bank Mandiri	Moderator: <i>Dio Caisar Darma</i> Bappeda Kaltim: <i>Wahyu Gatot Purboyo</i> OJK Kalimantan Timur: <i>Yuni Yasarani</i> BI Perwakilan Kalimantan Timur: <i>Faizal Rahman</i>
11.30-12.30	Diskusi	Moderator: <i>Dio Caisar Darma</i>
12.30-13.00	Penutup	DDPI Kaltim

Dokumentasi Kegiatan



Lampiran 1. Sesi acara (diskusi)



Lampiran 2. Penyampaian materi pertama

Implementasi Taksonomi Hijau dalam mendukung Keuangan Berkelanjutan

Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (DSKT) | 2023

Landasan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Konstitusi dan Komitmen Pemerintah Indonesia

Konstitusi - UUD 1945

- "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" - Pasal 28 H
- "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" - Pasal 33 ayat 3
- "Perencanaan nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" - Pasal 33 ayat 4

Paris Agreement – Komitmen dan Tindak Lanjut Indonesia

Paris Agreement adalah perjanjian internasional konvensi PBB tentang perubahan iklim yang mengikat secara hukum untuk membatasi peningkatan suhu global di bawah 2°C atau 1,5°C, dibandingkan dengan tingkat suhu global saat masa pra-industri.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016

Sebagai tindak lanjut, Indonesia telah menandatangani Paris Agreement melalui penempatan UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate Change.

Nationally Determined Contributions (NDC)

Komitmen atas perjanjian tersebut dituangkan dalam **Nationally Determined**. Indonesia telah menetapkan kontribusi nasional yang dituangkan dalam:

- (1) First NDC Republic of Indonesia - 2016.
- (2) Diperbarui melalui Updated NDC Republic of Indonesia - 2021.
- (3) Disempurnakan melalui Enhanced NDC Republic of Indonesia - 2022.

Target Penurunan Emisi Nasional tahun 2030

- 43.20% Dengan dukungan internasional
- 31.89% Dengan Upaya sendiri

Dibutuhkan Rp 4.002 Triliun (USD 281.23 miliar) untuk mendanai Upaya mitigasi perubahan iklim, dengan kebutuhan terbesar pada sektor energi senilai Rp 3.500 triliun (USD 245.59 miliar).

Lampiran 3. Penyampaian materi kedua

KEBIJAKAN KEUANGAN HIJAU DAN PERAN PERBANKAN DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN EKONOMI HIJAU

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
November 2023

Keuangan Berkelanjutan

- Latar Belakang: Risiko dan Peluang terkait Perubahan Iklim
- Peran Bank dalam Transisi Rendah Karbon
- Inisiatif Keuangan Hijau Bank Indonesia

Lampiran 4. Penyampaian materi ketiga